

Model Terpadu Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kawasan Obyek

Wisata Pantai Pasca Bencana

S. Bakti Istiyanto*

Abstract

There are a lot of difference policies for regional governments in Cilacap and Bantul after earthquake and tsunami on July, 17 2006. Cilacap government didn't give any programs to recover economical situation to their people except rebuild facilities around tourism at Widarapayung beach. Also in Bantul government, there is not program for to recover tourism activities because there thought that they have not any victims in that tsunami at Parang Tritis beach. Although they gave relocation program to their people but the program was not purposed to recover after tsunami. They had a plan to relocate trade location before the tsunami was coming. The most reason to relocate for people trading was to rearrange old location to new one and make the beach was shown clean and comfort for tourism acitivities. It is different if it's compare to Ciamis government policy to give recovery programs for their people at Pangandaran Beach. The programs were used to recovery tourism activities. In earlier program, people participation was involved by government. They were participated in economical recovery program planning. However largely people in Pangandaran feel this recovery programs although they are not participated in implementation phase. From this data, it is too difficult to try the economical recovery program as a model at Pangandaran beach to Widarapayung beach and Parang Tritis beach. This research used qualitative method with indepth interview and observation to collect data.

Key words: recovery program, model, participation

Pendahuluan

Bagi Indonesia, pariwisata telah menjadi sektor strategis dalam memperkuat perekonomian negara maupun sebagai elemen pemerataan pembangunan dari aspek kewilayahan. Kontribusi dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa pariwisata ini merupakan sektor penghasil utama devisa negara nonmigas. Sedangkan dari aspek kewilayahan, sektor pariwisata telah mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan pariwisata dan pusat-pusat pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Peran dan kontribusi signifikan tersebut telah semakin mengukuhkan pariwisata sebagai sektor strategis yang memiliki potensi dan peluang sangat besar untuk dikembangkan dan berperan menjadi lokomotif bagi upaya pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta revitalisasi perekonomian Indonesia.

Peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2006 mengakibatkan berbagai permasalahan baru di kawasan wisata Pantai Pangandaran

1 | *Penulis adalah Dosen Tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Ciamis, Pantai Widarapayung Cilacap dan Pantai Parangtritis Yogyakarta. Bahkan Pantai Pangandaran merupakan kawasan yang paling parah diterjang gelombang tsunami. Hampir semua sarana dan prasarana penunjang pariwisata di daerah tersebut luluh lantah ditelan ganasnya gelombang ini. Tidak hanya masalah pembangunan fisik, akan tetapi menyangkut seluruh ekosistem yang ada di sana, baik keadaan alam maupun sosial yang sangat memprihatinkan. Dapat dikutip dari hasil penelitian Resmiatin dan Istiyanto (dalam Jurnal Ilmiah Acta Diurna, 2007) diperoleh data yang berasal dari posko bencana Pangandaran, bencana gempa dan tsunami tersebut ditaksir menimbulkan kerugian material masyarakat Kabupaten Ciamis mencapai Rp 500 miliar. Belum di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Hancurnya potensi pariwisata yang ada di pantai ini secara otomatis juga menghancurkan potensi bidang yang lainnya, karena bidang pariwisata inilah yang menggerakkan lapangan usaha lain, seperti: pertanian, industri, perdagangan, maupun perhotelan. Mengingat pentingnya kawasan pantai sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi dari sektor wisata maka pasca gempa dan tsunami harus segera dipulihkan secepatnya. Pemerintah harus menyusun strategi yang tepat untuk memvitalkan kembali berbagai potensi di kawasan ini. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri menginstruksikan agar segera dibuat desain rekonstruksi (model) daerah bencana sekaligus pemulihan potensi Pantai Pangandaran pasca gempa dan tsunami (Resmiatin dan Istiyanto, 2007).

Pada intinya, kawasan wisata pantai harus dibuat lebih indah dan menarik dari sebelumnya. Selain aktualitas wacananya, atas dasar di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana keberhasilan pemulihan ekonomi yang diprogramkan pemerintah. Kekhawatiran program ini berlangsung tanpa perencanaan yang matang dan pelaksanaan program tersebut tanpa adanya partisipasi masyarakat justru akan menjadi fatal. Alih-alih akan berhasil justru yang terjadi obyek wisata pantai akan semakin ditinggal oleh para wisatawan.

Perumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan penelitian yaitu: “Bagaimana Ketepatan Model Terpadu Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kawasan Obyek Wisata Pantai Pasca Bencana Diwujudkan?”

Kajian Pustaka

Komunikasi Pembangunan

Salah satu kajian dari komunikasi yang akan dibahas dalam penelitian tentang revitalisasi pariwisata pasca gempa dan tsunami 17 Juli 2006 adalah komunikasi pembangunan. Keberhasilan pembangunan berawal dari adanya komunikasi dalam pembangunan. Komunikasi memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan.

Konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti yang luas dan terbatas. Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedang dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi. Dalam kasus pembangunan kembali obyek wisata yang terkena bencana, penelitian Istiyanto dan Runtiko (2007) menghasilkan data bahwa pembangunan kembali dimulai dari pendataan masyarakat yang secara langsung terkena musibah dan di sanalah komunikasi antar warga tercipta. Warga secara langsung menyampaikan keluhan dan masukan tentang besar kecilnya biaya pengganti dari pemerintah dan hal-hal lain yang perlu dibangun pertama kali seperti bangunan penahan dan pemecah ombak.

Agar komunikasi pembangunan lebih berhasil mencapai sasarannya, serta dapat menghindarkan kemungkinan efek-efek yang tidak diinginkan. Kesenjangan efek ditimbulkan oleh kekeliruan cara-cara komunikasi, hal ini bisa diperkecil bila memakai strategi komunikasi pembangunan yang dirumuskan sedemikian rupa, yang mencakup prinsip-prinsip berikut:

- a. Penggunaan pesan yang dirancang secara khusus (*tailored message*) untuk khalayak yang spesifik.
- b. Pendekatan "*ceiling effect*" yaitu dengan mengkomunikasikan pesan-pesan yang bagi golongan yang dituju (katakanlah golongan atas) merupakan redundansi (tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka atau kecil manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak yang hendak dicapai).

- c. Penggunaan pendekatan “*narrow casting*” atau melokalisir penyampaian pesan bagi kepentingan khalayak .
- d. Pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai bentuk pertunjukkan rakyat yang sejak lama berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat.
- e. Pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan (*disadvantage*), dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan.
- f. Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri.
- g. Diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme keikutsertaan khalayak (sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri) dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai evaluasinya (Nasution, 2004:163-164).

Sesuai dengan pendapat Nasution di atas, rancangan pelibatan atau partisipasi masyarakat terbentuk pada mulanya dengan mengumpulkan masyarakat dan mengklasifikasikannya sesuai bencana yang diterima, kemudian mereka akan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kembali sesuai kemampuan (Istiyanto dan Runtiko, 2007).

Dari hasil penelitian sebelumnya didapat data bahwa bentuk lembaga yang menjadi payung mekanisme keterlibatan masyarakat Pantai Pangandaran dapat dilihat dari lembaga Rukun Nelayan yang muncul menjadi pintu komunikasi antar nelayan di daerah Pangandaran (Resmiatin dan Istiyanto, 2007). Mereka di awalnya mendapat pengganti berupa perahu, jaring dan mesin tempel tergantung kerugian yang diderita berkisar tujuh juta hingga 25 juta rupiah (Istiyanto, Pangestuti dan Nur Aeni, 2008). Sayangnya, lembaga ini sekarang sudah tidak aktif karena merencanakan pertemuan hanya setahun sekali. Sebagai pengganti terbentuk kelompok nelayan yang terbagi dalam beberapa kelompok yang membicarakan tentang usaha para nelayan pangandaran secara umum.

Dalam penelitian Istiyanto, Pangestuti dan Nur Aeni (2008) tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemulihan ekonomi kawasan wisata ini sudah tidak muncul lagi. Terbukti ditemukan adanya pemasangan papan informasi penanggulangan bencana di Pantai Pangandaran tanpa diketahui dari siapa itu berasal. Masyarakat hanya menerima dari pemerintah tanpa ada pelibatan secara langsung lagi. Artinya, memang ada strategi partisipatori yang digunakan dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan di tahap perencanaan, sayangnya hal tersebut tidak maksimal bahkan pelaksanaan strategi media

dan pemasaran sebagai contoh yang dengan bukti pemasangan papan informasi tidak berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Meskipun tingkat partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan dapat dianggap belum optimal, perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatu dalam pembangunan wilayah. Secara luas, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Perencanaan dan pembangunan wilayah menjadi relevan karena di dalam aspek wilayah dan implementasi dalam kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan wilayah menyimpan tiga pilar penting (Hoover dan Giarratani dalam Nugroho dan Dahuri, 2004:12):

1. Keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*). Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemic, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki keunggulan komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam.
2. Aglomerasi (*imperfect divisibility*). Pilar ini merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan-keuntungan (*imperfect mobility*) sebagai akibat pemusatan ekonomi secara spasial.
3. Biaya transpor (*imperfect mobility of good and services*). Implikasinya adalah biaya yang terakit dengan jarak dan lokasi tidak dapat diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Partisipasi dan Pembinaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata

Partisipasi dapat diartikan sebagai ambil bagian, ikut, atau turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar (Marbun, 2002:407). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu *project* pembangunan.

Dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan perlu dilakukan juga pembinaan terhadap masyarakat pesisir. Pembinaan masyarakat pesisir bertujuan memberi perlindungan sosial dan memulihkan sumber daya sehingga masyarakat pesisir memiliki pilihan leluasa untuk meningkatkan produktivitasnya. Kegiatannya bersifat meluas meliputi kegiatan-kegiatan pembinaan sumber daya alam, penguasaan teknologi dan

informasi, dan peningkatan produksi. Meskipun demikian, kebijakan ditekankan pada pendekatan swadaya yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dengan intensif dari pemerintah ataupun komponen masyarakat sendiri. Dengan demikian, kata kunci kebijakan terletak pada keberpihakan karena tidak mungkin mengajak mereka berkompetisi dalam lapangan ekonomi. Melalui pembinaan intensif masyarakat pesisir secara bertahap akan menjadi mandiri, berpendapatan meningkat, dan terbebas dari kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004: 290).

Sektor pariwisata merupakan suatu usaha industri yang paling potensial, karena selain memiliki dampak akseleratif dan dampak multiplier yang bersifat *built-in flexible* dalam pembangunan daerah, usaha pariwisata juga merupakan katalisator yang memiliki kaitan ke depan dan ke belakang (*backward and forward linkages*) antar sektor, seperti: sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, pendidikan, teknologi, perdagangan, kebudayaan, komunikasi dan jasa-jasa lainnya. Pembangunan sektor dan obyek-obyek wisata oleh pemerintah melalui investasi daerah (*induce*) dapat merangsang sektor swasta untuk berinvestasi secara otomatis (dampak akseleratif *built in flexible*). Pembukaan dan pengembangan obyek wisata baru oleh pemerintah dapat merangsang pembukaan usaha-usaha baru oleh pihak swasta, seperti: perdagangan, perhotelan, sarana hiburan, dan jasa-jasa lainnya, pada gilirannya tidak saja dapat meningkatkan PAD (dampak multiplier). Peningkatan PAD dan pendapatan masyarakat ini selanjutnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah dan pembangunan sektor lain yang berarti terjadi reinvestasi. Eskalasi dampak multiplier dan akseleratif yang terus menerus dari sektor pariwisata, dapat menciptakan pembangunan daerah yang *built in flexible* secara berkelanjutan (Disbudpar, 2003:6).

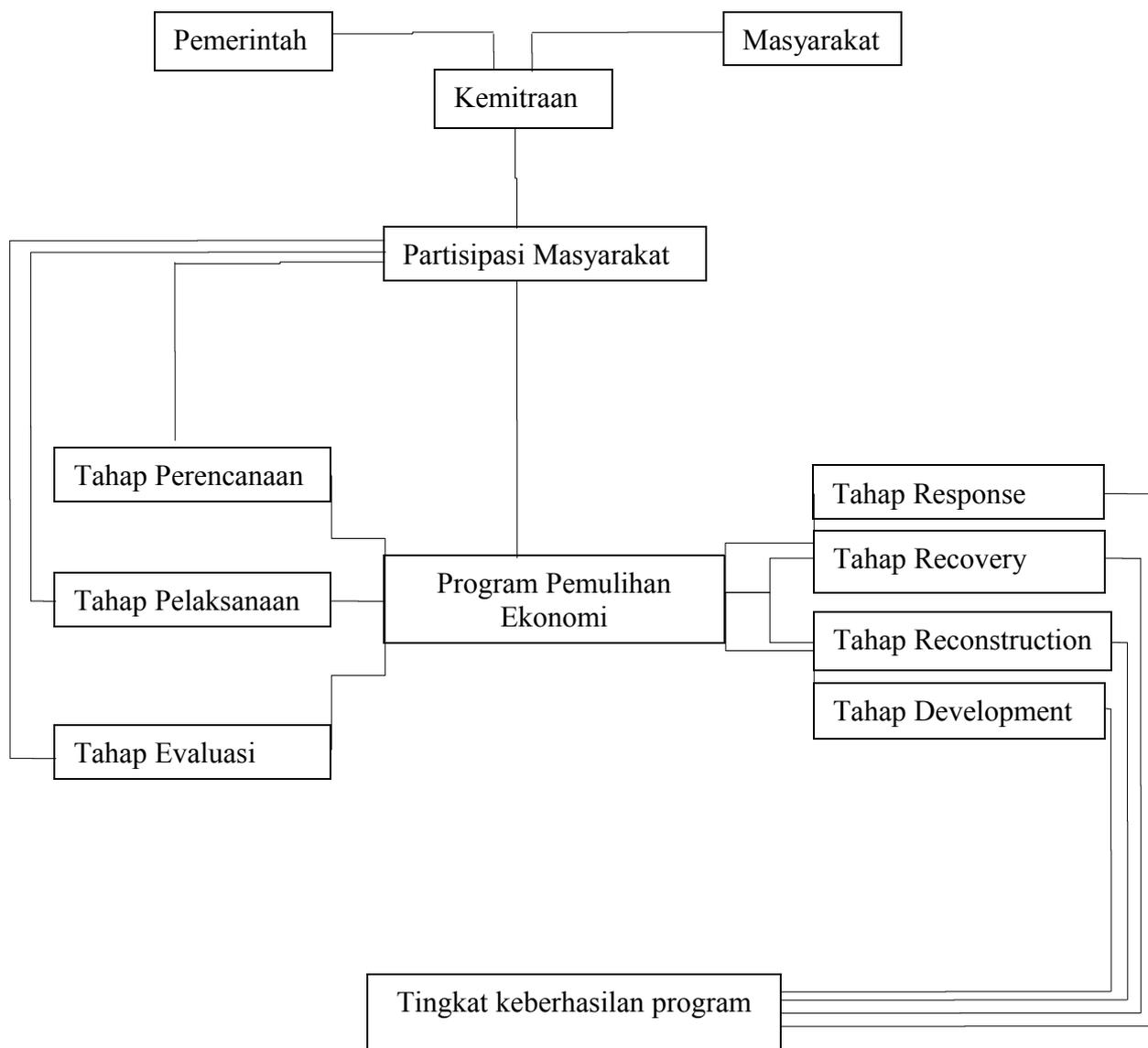
Terkait dengan pendapat bahwa dengan pariwisata akan meningkatkan PAD, ada catatan dari Made Sudana (dalam Jurnal Ilmiah Analisis Pariwisata, 2006) yang perlu diperhatikan bahwa pariwisata sekarang ini tidak sekedar meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, devisa dan pajak semata tetapi juga diperlukan kewaspadaan yang besar atas efek negatif berupa kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan hilangnya kontrol masyarakat lokal. Sehingga keterlibatan atau partisipasi masyarakat tetaplah menjadi kebutuhan mutlak dalam program penataan kembali sebuah kawasan wisata yang terkena bencana. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini urgen dilakukan.

Hasil Penelitian Tahun Pertama

Model Terpadu Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan dari data yang diperoleh selama pengumpulan data dan tahap analisa di tahun pertama, dapat dihasilkan sebuah model yang secara subjektif dapat menggambarkan alur proses program pemulihan ekonomi dari pemerintah yang lebih efektif terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program tersebut:

Flow chart/Model Pemulihan Ekonomi Basca Bencana Kawasan Wisata Pangandaran



Penjelasan:

Dalam model pemulihan ekonomi pasca bencana semestinya adanya kemitraan yang sejajar antara pemerintah dengan masyarakat. Proses kemitraan dari masyarakat tersebut berbentuk partisipasi atau pelibatan mereka dalam setiap tahap tahap program pemulihan ekonomi dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi.

Tujuan utama partisipasi masyarakat seperti dikatakan Schram (dalam Nasution, 2004:101) bertujuan untuk menciptakan arus informasi yang berjalan dari bawah ke atas. Sehingga keberlangsungan program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan muncul rasa kepemilikan bersama atas program tersebut (sense of belonging). Hal lain

diungkap oleh Made Sudana (2006) terkait dengan pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam program pemulihan ekonomi masyarakat daerah pariwisata yaitu pariwisata sekarang ini tidak sekedar meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, devisa dan pajak semata tetapi juga diperlukan kewaspadaan yang besar atas efek negatif berupa kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan hilangnya kontrol masyarakat lokal. Sehingga keterlibatan atau partisipasi masyarakat tetaplah menjadi kebutuhan mutlak dalam program penataan kembali sebuah kawasan wisata yang terkena bencana.

Dengan program yang dihasilkan secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah akan menjadikan program yang disusun secara terarah sesuai kebutuhan masyarakat baik dalam proses awal yaitu tahap *response* hingga tahap *development*. Hal ini, akan menjadi tingkat ukuran keberhasilan yang dirasakan bersama oleh pemerintah maupun masyarakat.

Model ini memang didasarkan atas pengamatan di lapangan dan hasil analisa peneliti dengan asumsi awal akan lebih memudahkan program pemulihan kawasan pariwisata Pangandaran ke depan secara lebih baik dengan pelibatan masyarakat ke dalam program tersebut secara langsung dan mengikat. Selaku pengguna tentu saja masyarakatlah yang secara langsung akan terkena imbas atau efek yang akan muncul di tahap pelaksanaan program pembangunan tersebut. Karena itu, upaya meminimalisasi efek negatif yang diperkirakan terjadi dengan bentuk komunikasi secara langsung dengan masyarakat akan lebih mengena dan akan menghasilkan kesiapan mereka serta akan sekaligus bertanggung jawab untuk ikut serta mencari solusi yang paling mungkin diusahakan semampu mereka. Mereka akan merasa tidak ditinggalkan oleh pemerintah dan dalam setiap tahapnya akan menghasilkan keterlibatan secara aktif dalam semua bentuk tahapan program pembangunan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) termasuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) yang merupakan lembaga pengelola pariwisata pantai di bawah dinas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Bantul, dan masyarakat kawasan obyek wisata pantai yang terkena dampak langsung bencana gempa dan tsunami 17 Juli 2006. Sementara jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 15 orang. Pemilihan informan dilakukan dengan cara sengaja (*purposive sampling*), yakni peneliti memilih informan, dalam hal ini adalah pemilihan informan yang dianggap tahu

dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan (observasi) dan dokumentasi.

Pembahasan

Hasil penelitian yang berlokasi di Pantai Pangandaran Ciamis ternyata terdapat perbedaan yang cukup mendasar penelitian yang berlokasi di kawasan Pantai Widarapayung Cilacap dan Pantai Parang Tritis Bantul Yogyakarta. Perbedaan-perbedaan tersebut dalam beberapa hal antara lain:

1. Korban jiwa di lokasi wisata Pantai Pangandaran sangat besar. Korban meninggal dunia sebanyak 429 orang, korban luka sebanyak 621 orang, korban hilang sebanyak 32 orang dan jumlah pengunjung sebanyak 3.739 orang. Di Pantai Widarapayung tercatat 70 orang meninggal (14 orang warga asli Desa Widarapayung lainnya adalah petani, pengunjung dan warga lain) dan 1 orang hilang. Sementara di Pantai Parang Tritis tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka. Yang dapat disebut korban hanyalah berupa bangunan tidak permanen dan berlokasi di batas garis (sempadan) bibir pantai sehingga tidak bisa dijadikan acuan pokok kerugian material yang harus diganti atau diberi santunan oleh pemerintah.
2. Perhatian yang sangat besar dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membangun kembali kawasan wisata Pantai Pangandaran sangat besar bila dibandingkan dengan yang diberikan pemerintah daerah di kawasan wisata Pantai Parang Tritis Bantul dapat dinilai kuranglah sepadan, bahkan hampir dapat dikatakan tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah daerah bila disamakan dengan kawasan wisata Pantai Widarapayung Cilacap hingga saat penelitian ini dilakukan.
3. Adanya program pembangunan kembali (*recovery economy*) secara terpadu di Pantai Pangandaran yang direncanakan sampai tahap lima tahun oleh pemerintah daerah dan menjadi arahan pembangunan kembali kawasan wisata Pantai Pangandaran. Untuk pantai Widarapayung, yang terjadi justru sangat berbeda karena tidak adanya program pembangunan yang cukup signifikan dapat dirasakan masyarakat bahkan sekedar program pemasaran wisata yang cukup memadai dari pemerintah daerah pun terasa sangat kurang. Secara

struktural memang dibentuk Laskar BPBD (Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah), namun bidang kerjanya tidak hanya menangani kawasan wisata saja tapi tindakan preventif dan penanggulangan bencana secara umum di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Karena fokus yang ditangani sangatlah melebar sementara kebutuhan perbaikan kawasan wisata Pantai Widarapayung sangatlah ditunggu pelaksanaannya, hal ini memunculkan perhatian dan kepedulian sekelompok masyarakat yang tanggap dengan bahaya munculnya bencana di kawasan wisata Pantai Widarapayung seperti kelompok SIBAT (Slaga bencana berBasis masyarakat) yang berdiri dan dikomandani oleh tokoh pemuda masyarakat asli Desa Widarapayung. Bahkan dalam aktivitasnya, kelompok ini mendapat bantuan dari pihak GRC Jerman dan UNDP dari PBB baik berupa bantuan stimulus dana dan bentuk-bentuk lain seperti pelatihan dan penyuluhan. Sementara di kawasan wisata Pantai Parang Tritis meskipun pada awalnya tidaklah merupakan program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh pemda Bantul namun adanya bencana gempa yang menimpa daerah Yogyakarta dan Klaten, seolah-olah menjadi pemicu dalam penataan kawasan wisata ini. Terbukti setelah adanya bencana muncul perda tentang penataan kegiatan usaha atau relokasi di atas batas teraman dari sempadan garis Pantai Parang Tritis. Meskipun wacana penataan ini telah muncul di awal tahun 2004, namun dalam praktiknya program ini dijalankan setelah terjadi bencana gempa tahun 2006 tersebut.

4. Bantuan dari berbagai sumber dialokasikan ke dalam beberapa jenis penggantian seperti bantuan atas korban meninggal, luka dan yang menjadi pengungsi serta bantuan modal usaha selain bantuan materi dan nonmateri berupa pelatihan dan penyuluhan bagi pelaku usaha, serta pembangunan fisik di Pantai Pangandaran Ciamis. Berbeda dengan yang terjadi di Pantai Widarapayung Cilacap dimana hanya ada bantuan bagi korban meninggal namun tidak ada upaya yang sistematis dalam penataan dan pemulihan kembali kawasan wisata pantai. Hal yang berbeda terjadi di kawasan Pantai Parang Tritis Bantul dimana tidak terdapat korban jiwa namun justru dijadikan momentum pemda Bantul dalam bentuk menata ulang lokasi atau relokasi kegiatan usaha masyarakat Parang Tritis ke tempat yang lebih aman dan

nyaman setelah sebelumnya berjalan dengan tidak tertib dan bersifat liar serta tidak permanen. Bantuan tidak diberikan berupa uang namun diberikan jatah los atau kios sebagai tempat usaha berdasar pendataan yang resmi dari aparat pemerintahan desa tentang warga dan jumlahnya yang pasti terlibat dalam aktivitas usaha.

5. Terkait dengan partisipasi masyarakat di kawasan Pantai Pangandaran di awal masyarakat dilibatkan dalam pendataan, pemberian modal bantuan, pelatihan dan dalam tahap berikutnya tingkat partisipasi bergantung dengan kebutuhannya. Di Pantai Widarapayung, keterlibatan masyarakat tidak berjalan optimal karena memang kurang terjalin adanya kerja sama antara pemerintah daerah khususnya pengelola wisata (Disbudpar) dengan para pelaku aktivitas kepariwisataan di lapangan. Sehingga untuk menjembatani kekurang komunikasian antara pemda dengan masyarakat dibentuk suatu pola partisipasi masyarakat dengan membentuk dan mendirikan secara mandiri SIBAT sebagai sebuah kelompok yang tidak terkait secara langsung dengan program-program dari pemerintah daerah namun sangat peduli dengan bencana di daerah mereka. Sementara di kawasan Parang Tritis keterlibatan masyarakat adalah dengan pendataan pelaku usaha dari masyarakat sendiri dan mengikuti bentuk-bentuk sosialisasi tentang penjagaan kawasan wisata dari ketidak tertiban baik di lokasi dan upaya menjaga kebersihannya, dan mengikuti penyuluhan tentang kemungkinan bencana-bencana yang mungkin terjadi. Semua ini dilaksanakan berkat adanya keterpaduan program kerja yang dicanangkan oleh dinas-dinas terkait di pemda Bantul dan disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung.

Relokasi kegiatan usaha di kawasan wisata Pantai Parang Tritis pada dasarnya bukanlah murni akibat adanya bencana gempa dan tsunami yang terjadi pertengahan tahun 2006. Karena pada awalnya wacana untuk memindahkan lokasi usaha bagi masyarakat didasarkan pada kondisi di lokasi wisata yang sangat tidak kondusif dalam mendukung kegiatan kepariwisataan. Hanya karena adanya pemicu berupa gempa yang melanda Kabupaten Bantul lah yang menjadikan upaya relokasi kegiatan usaha berubah ke dalam skala prioritas utama yang mendesak untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Jikalau tidak terjadi bencana maka program relokasi ini nampaknya bukan merupakan prioritas yang harus dikerjakan apalagi sumber anggaran untuk merelokasi ini pada saat itu belum ada.

Ketika dikaitkan dengan model terpadu pemulihan ekonomi masyarakat kawasan wisata pantai pasca bencana sebenarnya bukan merupakan program pembangunan yang bersifat baru yang dibuat karena menyikapi bencana yang terjadi seperti yang terjadi di kawasan wisata Pantai Pangandaran dimana program pemulihan ekonomi dibuat dan disusun berdasar kebutuhan dan partisipasi masyarakat meskipun hal tersebut berlaku hanya di awal perencanaan program saja. Namun tingkat pelibatan masyarakat tetaplah dimunculkan. Hal ini agak berbeda dengan kondisi yang terjadi di kawasan wisata Pantai Parang Tritis. Program ini bukanlah program pemulihan kembali namun berupa program penataan ke lokasi baru. Dasar yang digunakan menganalisa hal ini adalah *pertama* tiadanya korban baik jiwa maupun materi dari masyarakat di sekitar Pantai Parang Tritis. *Kedua*, program pembangunan berupa relokasi sudah direncanakan sejak tahun 2004 berbeda dengan program *economic recovery* masyarakat Pantai Pangandaran yang muncul pasca bencana tsunami terjadi. *Ketiga*, kurang terlibatnya masyarakat dalam perencanaan program tersebut. Rencana program ini sudah ada dan barulah disosialisasikan kepada masyarakat ketika sudah saatnya akan dilaksanakan. Hanya kepada mereka yang menolak atau tidak sependapat dilakukan berbagai pendekatan yang pada akhirnya mereka akan menyetujuinya. Meskipun ada penampungan usulan ke Disbupar Kabupaten Bantul dari masyarakat namun hal ini kurang terkait dengan program pembangunan kawasan wisata pantai karena bersifat umum seperti pembangunan desa wisata dan sebagainya. Tidak sama seperti yang terjadi di kawasan wisata Pantai Pangandaran dimana di awal penyusunan program (tahap perencanaan) masyarakat sangat fokus kepada tindakan pemerintah apa yang akan mereka terima dan apa saja yang diberikan pemerintah untuk mengembalikan kehidupan ekonomi mereka ke arah yang lebih minimal sama dengan sebelum terjadinya bencana tsunami.

Analisa di atas menunjukkan bahwa model pemulihan ekonomi terpadu seperti yang dihasilkan dalam penelitian tahun pertama tidak dapat diujikan ke luar wilayah Pantai Pangandaran. Hal ini bisa disebabkan situasi yang melingkupi permasalahan yang mendasari munculnya kebijakan dan program pembangunan yang ada berbeda di tiap-tiap wilayah. Dengan adanya otonomi daerah semakin terbukti bahwa pemerintah daerahlah

yang berkewajiban utama dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya. Seperti di lokasi wisata Pantai Widarapayung Cilacap, keberadaan objek wisata pantai yang sangat potensial dalam menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah tidaklah dikelola secara optimal. Terkesan pemda berlepas tangan dengan didasari tidak adanya *grand design* kepariwisataan yang memadai. Aktivitas kepariwisataan berjalan apa adanya, stagnan dan bahkan mati suri. Ketika terjadi bencana tsunami pun yang dilakukan sangatlah normatif seperti pemberian bantuan atau santunan kepada korban, pembangunan kembali shelter yang masih sangat kurang dibanding keberadaan program terpadu untuk menjadikan kawasan wisata Pantai Widarapayung menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Harapan ini juga menjadi jauh ketika sampai hari ini program pembangunan kembali masih belum dirasakan masyarakat.

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar atas sikap pemerintah daerah dalam menyikapi bencana yang melanda kawasan wisata pantai di daerahnya. Bila Pantai Pangandaran Ciamis berhasil menyusun program pemulihan ekonomi masyarakat dan melibatkan mereka dalam tahap perencanaan meskipun tidak terlibat lagi dalam tahap pelaksanaan dan evaluasinya, sangat berbeda dengan yang terjadi di lokasi wisata Pantai Widarapayung Cilacap dan Pantai Parang Tritis Bantul. Di Pantai Widarapayung sama sekali tidak terdapat program terpadu yang membuat lokasi wisata dan kehidupan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan karena tiadanya program pembangunan yang jelas menjadikan kegiatan kepariwisataan di lokasi ini berjalan di tempat. Sementara program yang dilaksanakan pemda Bantul di Pantai Parang Tritis merupakan ide lama yang telah ada sebelum terjadi bencana. Namun kemudian dengan terjadinya bencana gempa pembangunan relokasi kegiatan usaha bagi masyarakat seolah-olah mendapat pemicu dan momentumnya.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sangat berbeda di tiga lokasi yang diteliti. Bila di Pantai Pangandaran, masyarakat dilibatkan di awal perencanaan program dan program yang disusun dilaksanakan oleh pemerintah. Maka sangat berbeda dengan yang terjadi di lokasi wisata Pantai Widarapayung. Karena tidak ada program pemulihan atau penataan ekonomi masyarakat kawasan pantai dari pemerintah daerah maka pelibatan partisipasi masyarakat menjadi

mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan pemerintah. Muncul kelompok mandiri masyarakat yaitu SIBAT yang peduli adanya bencana di kawasan wisata tempat mereka tinggal dan hidup. Sementara masyarakat Pantai Parang Tritis sudah dalam tahap menerima karena program ini telah direncanakan pemda Bantul sdua tahun sebelum dilaksanakan dan dipicu karena terjadinya bencana gempa yang melanda Kabupaten Bantul dan sekitarnya.

3. Terkait dengan tahapan pengujian model dan memperluasnya agar dapat digunakan secara tepat sasaran pada obyek pariwisata yang sejenis dapat disimpulkan bahwa data penelitian yang diperoleh tidak memungkinkan hal ini terjadi. Hal utama yang menjadikan kesimpulan ini adalah perbedaan situasi dan permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah dan bagaimana mereka menyikapi serta memilih cara menyelesaikan masalah menggunakan kebijakan dan program yang telah ditentukan masing-masing daerah.

Daftar Pustaka

- Disbudpar. 2003. *Kondisi Ketenagakerjaan Pada Usaha Kepariwisata Di Jawa Barat*. Bandung.
- Istiyanto, Bekti dan Runtiko, Agus Ganjar. 2007. *Economic Recovery Masyarakat Kawasan Objek Wisata Pangandaran Pasca Gempa dan Tsunami 17 Juli 2006*. Belum Dipublikasikan
- Istiyanto, Bekti. Pangestuti, Sri dan Nur Aeni, Eni. 2008. *Evaluasi Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kawasan Objek Wisata Pangandaran Pasca Gempa dan Tsunami 17 Juli 2006*. Belum Dipublikasikan
- Marbun, B.N. 2002. *Kamus Politik*. CV Muliasari. Jakarta.
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nugroho, Iwan dan Rokhim Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Resmiatin, Mia, dan Istiyanto, Bekti. 2007. *Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata Pantai Pangandaran*. Jurnal Ilmiah

Komunikasi Acta Diurna Vol 4 No 1 Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas
Jenderal Soedirman Purwokerto
Sukadana, Made. 2006. *Postmodernisme Dan Pariwisata Kerakyatan*. Jurnal Ilmiah
Analisis Pariwisata Volume 7 No 2. Universitas Udayana. Denpasar.